Populis: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
P-ISSN: 1907-9893 | E-ISSN: 3090-7047
Volume 18 No. 1 | November 2023
https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/populis/index

RESEARCH ARTICLE OPEN ACCESS

Strategi Pengembangan Pariwisata Hijau: Urgensi Regulasi dan Sinergi Multisektoral di Kota Ambon

Green Tourism Development Strategy: The Urgency of Regulation and Multisectoral Synergy in Ambon City

https://doi.org/10.30598/populis.18.1.85-103

Reina Iriene Hunihua[1*], Hatty Suat[2]
[1]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon 97233, Indonesia
[2]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon 97233, Indonesia
*rienanidinaz7@gmail.com

Abstract

The development of green tourism in Ambon City has become an urgent necessity in addressing environmental challenges and the sustainability of the tourism sector. However, the existing policies have not yet provided specific regulations to support the implementation of this concept. This study aims to analyze green tourism development strategies through a regulatory approach and multisectoral synergy. The research employs a qualitative method, including policy studies, interviews with stakeholders, and an analysis of best practices in sustainable destination management. The findings indicate that the absence of comprehensive regulations hinders the optimization of green tourism potential in Ambon. Therefore, a cross-sectoral policy approach is required, involving the government, tourism industry players, tourism-conscious communities, and academics in formulating adaptive and participatory strategies. This synergy is expected to enhance the competitiveness of Ambon City's tourism sector, encourage sustainable investment, and positively impact community welfare. This study contributes to the development of social sciences and humanities, particularly in sustainable tourism policy, and serves as a reference for local governments in formulating more inclusive policies to establish Ambon as a leading green tourism destination in Maluku.

Keywords: *Green Tourism, Sustainable Tourism Policy, Multisectoral Synergy, Tourism Development Strategy, Regulatory Framework*

Info Artikel
Naskah diterima: *05/01/2023*
Revisi terakhir: *10/02/2023*
Disetujui: *20/02/2023*

Copyright © by the Authors

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

PENDAHULUAN

Pariwisata hijau semakin menjadi isu strategis di tengah meningkatnya kesadaran global terhadap dampak negatif pariwisata konvensional, baik dari segi lingkungan maupun sosial (Dwyer, 2018; Šaparnienė et al., 2022). Konsep ini mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan destinasi wisata, termasuk efisiensi sumber daya, konservasi lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat lokal (Cheung & Li, 2019; Klerck & Baets, 2020). Di Indonesia, gagasan pariwisata hijau mulai diadopsi dalam berbagai kebijakan nasional dan daerah. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala yang cukup besar, terutama dalam aspek regulasi, koordinasi antar pemangku kepentingan, dan keterlibatan komunitas (Rahman & Baddam, 2021).

Kota Ambon, sebagai ibu kota Provinsi Maluku, memiliki potensi besar untuk mengembangkan pariwisata hijau berkat kekayaan alamnya yang meliputi pesisir, ekosistem

laut, serta warisan budaya yang unik (Meturan et al., 2021). Namun, hingga saat ini, belum ada kebijakan yang secara eksplisit mengatur implementasi pariwisata hijau di Ambon, sehingga inisiatif yang muncul cenderung sporadis dan kurang terkoordinasi (Bastian et al., 2018; Joseph et al., 2020). Ketidakhadiran regulasi yang jelas menyebabkan berbagai tantangan, seperti eksploitasi sumber daya alam tanpa perencanaan jangka panjang, kurangnya insentif bagi industri pariwisata untuk menerapkan praktik ramah lingkungan, serta rendahnya partisipasi komunitas dalam pengelolaan destinasi (Amin, 2019; Renjaan & Renjaan, 2022).

Selain itu, masih lemahnya sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas lokal turut memperburuk kondisi ini (Bandjar et al., 2021; Kennedy et al., 2018). Banyak destinasi wisata di Ambon yang berpotensi dikembangkan dengan konsep keberlanjutan, tetapi belum dikelola secara optimal karena kebijakan yang ada masih bersifat umum dan belum mengakomodasi kebutuhan spesifik industri pariwisata hijau (Jalmaf et al., 2022; Romeon & Sukmawati, 2021). Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai strategi pengembangan pariwisata hijau di Kota Ambon, dengan menyoroti aspek regulasi dan sinergi multisektoral yang dapat menjadi landasan bagi perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian tentang pariwisata hijau telah berkembang secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir, dengan banyak kajian yang menyoroti peran regulasi dan sinergi lintas sektor dalam memastikan keberlanjutan industri pariwisata (B. D. Moyle et al., 2018; C. Moyle et al., 2021; Ngassam et al., 2022). Menurut Ngassam et al. (2022)pendekatan multisektoral yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pariwisata hijau, karena sektor pariwisata sangat bergantung pada koordinasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Afionis et al. (2020) menekankan bahwa tanpa regulasi yang kuat dan dukungan lintas sektor, prinsip keberlanjutan dalam industri pariwisata hanya akan menjadi retorika tanpa implementasi yang nyata. Hal ini diperkuat oleh studi Kim & Bramwell (2019) yang menemukan bahwa destinasi wisata yang memiliki kebijakan lingkungan yang jelas cenderung lebih berhasil dalam mempertahankan daya tarik ekowisata mereka dibandingkan dengan destinasi yang mengandalkan inisiatif individu. Dalam konteks Indonesia, Kawuryan et al. (2022) dan Wijaya et al. (2019) mengungkapkan bahwa implementasi pariwisata hijau masih bersifat parsial dan bergantung pada inisiatif daerah, sehingga tidak ada standar nasional yang dapat menjadi acuan utama.

Studi terbaru oleh Purbadi & Lake (2022) menunjukkan bahwa komunitas lokal memainkan peran penting dalam mendukung keberlanjutan pariwisata hijau. Namun, tanpa adanya kebijakan yang memfasilitasi keterlibatan mereka, upaya pelestarian lingkungan sering kali menemui hambatan. Riset oleh Armenski et al. (2018) menambahkan bahwa faktor utama keberhasilan destinasi wisata hijau adalah sinergi antara sektor publik dan swasta dalam menciptakan model bisnis yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian oleh Ibnou-Laaroussi et al. (2020) dan Pan et al. (2018) menyoroti perlunya insentif ekonomi bagi industri

pariwisata untuk menerapkan prinsip keberlanjutan, seperti subsidi bagi usaha yang menggunakan energi terbarukan atau program sertifikasi ekowisata.

Lebih jauh, beberapa penelitian internasional juga menunjukkan bahwa destinasi wisata yang berhasil menerapkan prinsip pariwisata hijau memiliki regulasi yang jelas dan program insentif bagi pelaku industri (Bui et al., 2020; Casado-Aranda et al., 2021; Sobaih et al., 2021; Wondirad et al., 2020). Sebagai contoh, penelitian oleh Wondirad et al. (2020) di Eropa menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki kebijakan ketat mengenai konservasi lingkungan mampu menarik lebih banyak wisatawan berkualitas yang peduli terhadap keberlanjutan. Sementara itu, Jiang et al. (2019) dan Orîndaru et al. (2021) menggarisbawahi bahwa destinasi wisata yang mengadopsi kebijakan keberlanjutan cenderung lebih tahan terhadap krisis lingkungan dan ekonomi.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas aspek regulasi dan sinergi dalam pengembangan pariwisata hijau, kajian spesifik mengenai bagaimana Kota Ambon dapat mengadopsi strategi berbasis kebijakan lintas sektor masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada implementasi di daerah dengan ekosistem pariwisata yang telah berkembang pesat, seperti Bali dan Yogyakarta, yang memiliki infrastruktur memadai, dukungan regulasi yang relatif kuat, serta tingkat keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih terstruktur. Konteks ini berbeda dengan Kota Ambon, yang sebagai bagian dari wilayah kepulauan memiliki tantangan geografis, keterbatasan aksesibilitas, serta kurangnya koordinasi lintas sektor dalam pembangunan pariwisata hijau. Oleh karena itu, pendekatan yang berhasil diterapkan di destinasi wisata utama di Indonesia belum tentu dapat diadopsi secara langsung di Ambon tanpa penyesuaian terhadap kondisi lokal yang unik.

Selain itu, aspek koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam konteks pariwisata hijau di Ambon masih belum banyak dikaji secara mendalam. Keberhasilan pariwisata hijau tidak hanya bergantung pada adanya regulasi yang memadai, tetapi juga pada efektivitas sinergi antara pemerintah, sektor swasta, komunitas lokal, serta akademisi dalam perencanaan dan implementasi kebijakan. Namun, dalam konteks Ambon, sinergi ini masih menghadapi berbagai hambatan, seperti tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, minimnya insentif bagi pelaku usaha untuk menerapkan prinsip keberlanjutan, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya praktik pariwisata yang ramah lingkungan. Kurangnya studi yang menelaah secara spesifik dinamika ini menyebabkan masih adanya kesenjangan dalam perumusan kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan pariwisata hijau secara efektif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi strategi pengembangan pariwisata hijau yang berbasis regulasi dan sinergi multisektoral di Kota Ambon. Studi ini tidak hanya akan menganalisis kebijakan yang telah diterapkan di daerah lain sebagai perbandingan, tetapi juga akan menyesuaikan pendekatan tersebut dengan karakteristik dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh Ambon sebagai kota kepulauan. Dengan memahami bagaimana kebijakan dapat berperan dalam menciptakan

ekosistem pariwisata yang lebih berkelanjutan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang tidak hanya relevan bagi pengambil kebijakan di Maluku, tetapi juga bagi daerah kepulauan lainnya yang menghadapi tantangan serupa. Lebih jauh, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen kunci dalam pengembangan pariwisata hijau di Ambon serta mengkaji bagaimana kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan komunitas lokal dapat dioptimalkan. Dengan pendekatan yang berbasis pada regulasi yang adaptif serta sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan, diharapkan Ambon dapat berkembang menjadi destinasi wisata hijau yang unggul di kawasan timur Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam strategi pengembangan pariwisata hijau di Kota Ambon. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan ruang bagi pemahaman yang lebih holistik terhadap fenomena sosial, ekonomi, dan kebijakan yang membentuk realitas pariwisata hijau di tingkat lokal (Coronella & Aiken-Wisniewski, 2022). Penelitian ini tidak hanya berfokus pada kebijakan formal, tetapi juga pada interaksi antar pemangku kepentingan, dinamika sosial yang terjadi, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi konsep wisata hijau. Studi kasus digunakan karena penelitian ini ingin memahami konteks spesifik pengembangan pariwisata hijau di Kota Ambon dan bagaimana berbagai aktor berkontribusi dalam proses tersebut (Abdalla et al., 2018). Kota Ambon dipilih sebagai lokus penelitian karena memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata berbasis lingkungan, terutama dengan keberadaan pantai, ekosistem pesisir, dan kekayaan budaya yang dapat diintegrasikan dalam konsep wisata hijau. Namun, hingga saat ini, regulasi yang secara khusus mengatur pariwisata hijau di Ambon masih terbatas, sehingga pendekatan multisektoral menjadi kebutuhan yang mendesak.

Kota Ambon memiliki karakteristik geografis dan sosial yang unik sebagai daerah kepulauan dengan lanskap alam yang mendukung ekowisata dan pariwisata berbasis komunitas. Keberagaman hayati di wilayah pesisir serta praktik kearifan lokal seperti *sasi*—tradisi adat dalam pengelolaan sumber daya alam—menunjukkan potensi besar bagi implementasi pariwisata hijau (Rahmawati et al., 2021; Susiyanto, 2022). Namun, dalam praktiknya, belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur model pengelolaan pariwisata hijau di Kota Ambon. Selain itu, adanya ketimpangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan sering kali menyebabkan pariwisata berkembang dengan cara yang kurang memperhatikan keberlanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis bagaimana kebijakan dapat mendukung pariwisata hijau di Kota Ambon, serta bagaimana sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan komunitas lokal dapat membentuk ekosistem pariwisata yang lebih berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan mereka dalam sektor pariwisata, kebijakan, serta kehidupan sosial-ekonomi di Kota Ambon. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif dari berbagai

pemangku kepentingan yang berperan dalam pengembangan pariwisata hijau. Sebanyak 12 informan utama dilibatkan dalam penelitian ini, yang terdiri dari perwakilan pemerintah daerah, tokoh adat dan masyarakat, pelaku usaha pariwisata, komunitas sadar wisata, aktivis lingkungan, serta akademisi dan peneliti.

Kelompok pertama terdiri dari dua perwakilan pemerintah daerah, yaitu Dinas Pariwisata Kota Ambon dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku. Mereka dipilih untuk memberikan wawasan mengenai kebijakan dan regulasi yang telah atau belum diterapkan dalam mendukung pariwisata hijau. Dengan keterlibatan mereka, penelitian ini dapat mengidentifikasi kendala struktural dan peluang kebijakan yang dapat dioptimalkan untuk membangun ekosistem wisata yang berkelanjutan.

Kelompok kedua melibatkan tiga tokoh adat dan masyarakat yang memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya berbasis kearifan lokal. Informan dalam kategori ini mencakup seorang Kepala Negeri atau tokoh adat yang berperan dalam tata kelola sumber daya alam, seorang Latupati (pemuka adat) yang memahami sistem *sasi* dalam perlindungan ekosistem pesisir, serta seorang pemuda adat yang aktif dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Pemilihan mereka bertujuan untuk memahami bagaimana nilai-nilai lokal dan tradisi dapat dikombinasikan dengan kebijakan modern guna mendukung pariwisata hijau yang berbasis pada kearifan masyarakat.

Kelompok ketiga terdiri dari tiga pelaku usaha pariwisata, yakni seorang pemilik homestay, operator wisata bahari, serta seorang pemandu wisata. Mereka memberikan perspektif langsung terkait tantangan serta peluang dalam penerapan praktik wisata hijau di Kota Ambon. Dengan pengalaman mereka, penelitian ini dapat mengidentifikasi hambatan praktis yang dihadapi sektor swasta dalam menjalankan bisnis wisata yang ramah lingkungan serta strategi untuk mendorong keterlibatan pelaku usaha dalam inisiatif keberlanjutan.

Kelompok keempat mencakup dua perwakilan dari komunitas sadar wisata dan aktivis lingkungan yang aktif dalam edukasi wisata berkelanjutan serta pelestarian lingkungan. Mereka memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat serta mengembangkan program berbasis konservasi yang dapat memperkuat ekosistem pariwisata hijau. Dengan wawasan mereka, penelitian ini dapat mengeksplorasi strategi efektif dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata berbasis keberlanjutan. Kelompok terakhir terdiri dari dua akademisi dari Universitas Pattimura yang memiliki kajian tentang kebijakan lingkungan dan pariwisata berkelanjutan. Kontribusi mereka dalam penelitian ini sangat penting dalam memberikan perspektif berbasis teori dan penelitian ilmiah terkait regulasi serta model pengelolaan pariwisata hijau yang dapat diterapkan di Kota Ambon.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen (Coronella & Aiken-Wisniewski, 2022; Kvale & Brinkmann, 2019). Pendekatan ini dirancang untuk memperoleh pemahaman yang holistik mengenai dinamika pengembangan pariwisata hijau di Kota Ambon serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada. Setiap metode digunakan secara

komplementer guna memastikan kedalaman analisis serta memperkuat validitas temuan penelitian. Metode pertama adalah wawancara mendalam yang dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas dalam mengeksplorasi pengalaman dan pandangan informan mengenai strategi pengembangan pariwisata hijau (Kvale & Brinkmann, 2019; Monday, 2020). Wawancara ini dilakukan baik secara langsung maupun daring, dengan durasi rata-rata 45–60 menit per sesi. Informan terdiri dari pemangku kepentingan utama seperti perwakilan pemerintah, tokoh adat, pelaku usaha pariwisata, komunitas sadar wisata, aktivis lingkungan, serta akademisi. Setiap wawancara direkam dan ditranskripsi guna memastikan keakuratan data serta memudahkan analisis lebih lanjut.

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan metode observasi partisipatif untuk memahami bagaimana praktik pariwisata hijau diterapkan di lapangan. Observasi dilakukan di beberapa lokasi wisata yang berpotensi dikembangkan sebagai destinasi hijau, termasuk pantai, kawasan ekowisata, dan desa wisata. Selama observasi, interaksi antara wisatawan, masyarakat lokal, dan pengelola wisata diperhatikan secara cermat untuk mengidentifikasi pola perilaku serta tantangan yang muncul dalam implementasi konsep pariwisata hijau. Dokumentasi berupa catatan lapangan, foto, dan video diambil untuk memperkaya hasil analisis serta memberikan gambaran visual mengenai kondisi aktual di lapangan.

Studi dokumen menjadi metode ketiga dalam penelitian ini, dengan fokus pada analisis berbagai kebijakan dan regulasi terkait pariwisata di Kota Ambon. Kajian dilakukan terhadap peraturan daerah, rencana strategis pariwisata, serta laporan penelitian sebelumnya yang relevan. Tujuan dari studi dokumen ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana aspek keberlanjutan telah diakomodasi dalam kebijakan yang ada, serta mengidentifikasi celah regulasi yang dapat diperbaiki guna mendukung pengembangan pariwisata hijau secara lebih efektif.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi dalam tiga bentuk utama. Pertama, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai pemangku kepentingan guna mengidentifikasi pola yang konsisten atau kontradiktif. Kedua, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan data observasi dan studi dokumen, sehingga bias subjektif dapat diminimalkan. Ketiga, triangulasi peneliti diterapkan melalui diskusi dengan akademisi dan praktisi pariwisata hijau untuk mengonfirmasi hasil temuan serta memastikan bahwa analisis tidak hanya bergantung pada satu perspektif (Bans-Akutey & Tiimub, 2021; Dewasiri et al., 2018; Santos et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Green Tourism Policy: Dinamika Kebijakan Pariwisata Hijau di Kota Ambon

Kota Ambon, sebagai salah satu destinasi utama di Maluku, memiliki potensi besar untuk mengembangkan pariwisata berbasis keberlanjutan. Keindahan alam pesisir, keanekaragaman hayati laut, serta kearifan lokal yang kaya menjadikan wilayah ini sangat

strategis untuk menerapkan konsep pariwisata hijau. Namun, hingga saat ini, regulasi yang secara eksplisit mengatur pengembangan pariwisata hijau di Kota Ambon masih belum ditemukan dalam dokumen kebijakan resmi. Meskipun terdapat beberapa regulasi terkait pariwisata dan lingkungan hidup, implementasi strategi yang mengarah pada keberlanjutan masih bersifat parsial dan belum menjadi prioritas utama dalam pengelolaan destinasi wisata.

Dinas Pariwisata Kota Ambon telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait pengembangan pariwisata, termasuk Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA). Namun, dalam dokumen tersebut, istilah "pariwisata hijau" atau konsep keberlanjutan hanya disebutkan secara umum, tanpa adanya langkah-langkah konkret yang mengatur bagaimana prinsip-prinsip keberlanjutan dapat diintegrasikan ke dalam praktik pariwisata sehari-hari. Seorang pejabat dari Dinas Pariwisata Kota Ambon mengungkapkan bahwa meskipun pentingnya pariwisata hijau telah disadari, hingga saat ini regulasi spesifik terkait masih sebatas wacana. Kebijakan yang ada lebih banyak berorientasi pada peningkatan jumlah wisatawan dibandingkan dengan keberlanjutan destinasi itu sendiri.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran akan pentingnya pariwisata hijau mulai muncul, belum ada kebijakan yang benar-benar mengarahkan para pemangku kepentingan untuk menerapkannya secara sistematis. Selain itu, dalam observasi lapangan yang dilakukan di beberapa destinasi wisata di Ambon, seperti Pantai Natsepa, Pintu Kota, dan beberapa desa wisata di pesisir, ditemukan bahwa praktik keberlanjutan masih belum menjadi bagian integral dari manajemen pariwisata. Misalnya, di Pantai Natsepa, meskipun sudah ada inisiatif dari komunitas lokal untuk menjaga kebersihan pantai, masih ditemukan sampah plastik yang berserakan, dan belum ada sistem pengelolaan limbah yang efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa regulasi yang mengatur pengelolaan destinasi berbasis lingkungan masih belum diterapkan secara optimal.

Kebijakan lingkungan hidup yang ada di Kota Ambon juga belum sepenuhnya selaras dengan upaya pengembangan pariwisata hijau. Regulasi terkait pengelolaan lingkungan, seperti Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, lebih banyak menitikberatkan pada konservasi sumber daya alam tanpa secara spesifik mengintegrasikan sektor pariwisata sebagai bagian dari strategi perlindungan lingkungan. Salah satu aktivis lingkungan di Ambon menyatakan bahwa pariwisata dapat menjadi ancaman bagi lingkungan jika tidak diatur dengan baik. Ia menyoroti bagaimana pembangunan fasilitas wisata sering kali mengabaikan daya dukung lingkungan, yang berpotensi merusak ekosistem setempat. Menurutnya, diperlukan regulasi yang jelas agar aktivitas pariwisata dapat berjalan seiring dengan upaya konservasi.

Analisis terhadap konsep *green tourism policy* yang dikemukakan oleh Pan et al. (2018) menunjukkan bahwa kebijakan yang efektif dalam pengembangan pariwisata hijau harus berbasis pada pendekatan multisektoral. Pendekatan ini mengharuskan adanya keterlibatan berbagai aktor, termasuk pemerintah, komunitas lokal, pelaku usaha, akademisi, dan organisasi lingkungan, dalam merancang kebijakan yang holistik dan berkelanjutan. Dengan kata lain, regulasi tidak hanya harus ada, tetapi juga harus dirancang dengan

mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, konservasi lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

Dalam konteks Kota Ambon, kebijakan multisektoral dapat menjadi solusi untuk mengisi kekosongan regulasi terkait pariwisata hijau. Jika pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan komunitas adat dalam mengintegrasikan konsep *sasi*—sebuah sistem pengelolaan sumber daya berbasis kearifan lokal—ke dalam kebijakan pariwisata hijau, maka pengelolaan destinasi wisata akan lebih berkelanjutan. Selain itu, dengan melibatkan akademisi dalam proses perancangan kebijakan, regulasi yang dihasilkan akan lebih berbasis pada kajian ilmiah yang mempertimbangkan aspek ekologis dan sosial secara komprehensif.

Sinergi Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Pariwisata Hijau

Pariwisata hijau bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan sistem yang berkelanjutan. Pemerintah, masyarakat adat, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas sadar wisata memiliki peran masing-masing dalam memastikan bahwa pengelolaan destinasi wisata di Kota Ambon tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga mempertahankan kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Namun, dalam praktiknya, sinergi antara aktor-aktor ini masih belum optimal, sehingga pengembangan pariwisata hijau di Kota Ambon berjalan dengan tantangan yang cukup kompleks.

Pemerintah daerah, melalui Dinas Pariwisata Kota Ambon, memiliki peran utama dalam merancang kebijakan dan regulasi yang mendukung pariwisata hijau. Namun, seperti yang disampaikan dalam wawancara dengan seorang pejabat Dinas Pariwisata, koordinasi lintas sektor masih menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan keberlanjutan. Ia mengungkapkan bahwa meskipun terdapat program untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya wisata hijau, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam membangun sinergi antara berbagai pemangku kepentingan. Regulasi yang ada dinilai belum cukup spesifik dan sering kali kurang terintegrasi dengan sektor lain, seperti lingkungan dan ekonomi kreatif, sehingga upaya menuju pariwisata berkelanjutan belum berjalan secara optimal.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah memiliki inisiatif dalam mengembangkan pariwisata hijau, kebijakan yang ada masih terfragmentasi dan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan lintas sektor. Masyarakat adat di Kota Ambon, khususnya dalam komunitas pesisir, memiliki tradisi lokal yang dapat berkontribusi pada keberlanjutan pariwisata, seperti praktik *sasi*—sebuah sistem larangan sementara terhadap eksploitasi sumber daya alam untuk memastikan pemulihan ekosistem. Namun, dalam observasi lapangan yang dilakukan di beberapa desa wisata, ditemukan bahwa integrasi antara kebijakan pemerintah dan nilai-nilai kearifan lokal masih minim. Sebagai contoh, di Desa Amahusu, terdapat inisiatif komunitas untuk menerapkan *sasi* laut guna melindungi ekosistem pesisir, tetapi belum ada dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah untuk mengadopsi sistem ini dalam regulasi pariwisata hijau. Salah satu tokoh adat di desa tersebut mengungkapkan bahwa praktik *sasi* telah lama diterapkan dalam

pengelolaan sumber daya alam, namun dalam konteks pariwisata, masih banyak wisatawan yang belum memahami aturan ini. Ia menekankan perlunya kerja sama antara pemerintah dan operator wisata agar aturan adat yang berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem ini dapat dipahami dan dipatuhi oleh wisatawan, sehingga keberlanjutan lingkungan dan budaya lokal tetap terjaga.

Kondisi ini menegaskan perlunya pendekatan yang lebih integratif agar praktik-praktik keberlanjutan yang sudah ada dalam masyarakat dapat diadopsi secara lebih luas dalam pengelolaan destinasi wisata. Pelaku usaha di sektor pariwisata juga memiliki peran kunci dalam pengembangan pariwisata hijau. Beberapa hotel dan restoran di Ambon telah menerapkan konsep ramah lingkungan, seperti pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan pengolahan limbah yang lebih bertanggung jawab. Namun, mayoritas usaha pariwisata masih berorientasi pada keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak ekologis yang lebih luas. Seorang pengelola resor di Ambon mengungkapkan bahwa meskipun ada keinginan untuk menerapkan konsep ramah lingkungan, minimnya insentif dari pemerintah menjadi tantangan utama. Ia menyoroti bahwa tanpa regulasi yang jelas serta dukungan berupa insentif pajak atau subsidi bagi usaha yang mengadopsi prinsip keberlanjutan, sulit bagi pelaku industri untuk beralih ke praktik wisata hijau. Dengan adanya kebijakan yang lebih mendukung, ia meyakini bahwa lebih banyak pelaku usaha akan tertarik menerapkan konsep tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada inisiatif dari pelaku usaha, kurangnya kebijakan insentif dari pemerintah menjadi salah satu hambatan dalam penerapan praktik keberlanjutan di sektor pariwisata. Akademisi dari perguruan tinggi di Maluku juga memiliki peran penting dalam riset dan inovasi kebijakan yang mendukung pariwisata hijau. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengembangkan strategi berbasis sains dalam pengelolaan lingkungan dan wisata berbasis komunitas. Namun, hasil penelitian ini sering kali tidak terhubung langsung dengan implementasi kebijakan. Seorang peneliti dari Universitas Pattimura menyampaikan bahwa meskipun berbagai penelitian tentang keberlanjutan wisata telah dilakukan, implementasi hasil riset di lapangan masih sangat terbatas. Ia menekankan pentingnya adanya forum rutin yang mempertemukan akademisi, pemerintah, dan pelaku usaha agar temuan penelitian dapat diterapkan secara lebih efektif. Menurutnya, tanpa kolaborasi yang kuat, inovasi dan rekomendasi dari penelitian hanya akan berakhir sebagai wacana tanpa dampak nyata bagi pengembangan pariwisata hijau di Ambon.

Ini mengindikasikan bahwa dunia akademik perlu lebih dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan agar rekomendasi berbasis ilmiah dapat diterapkan secara efektif dalam strategi pengelolaan pariwisata. Sementara itu, komunitas sadar wisata di Kota Ambon juga telah berperan dalam membangun kesadaran wisata hijau melalui program-program edukasi bagi wisatawan dan masyarakat lokal. Beberapa komunitas telah menginisiasi gerakan bersih pantai dan pengurangan sampah plastik di destinasi wisata. Namun, program-program ini masih bersifat sporadis dan belum mendapatkan dukungan yang memadai dari pemerintah atau sektor swasta. Seorang anggota komunitas sadar wisata mengungkapkan

bahwa upaya mereka dalam mengembangkan pariwisata hijau selama ini lebih banyak didorong oleh inisiatif mandiri. Meskipun berbagai program telah dijalankan secara swadaya, ia menekankan bahwa tanpa koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah dan pelaku industri pariwisata, dampak yang dihasilkan masih terbatas. Menurutnya, sinergi yang lebih erat antara komunitas, pemerintah, dan sektor swasta dapat mempercepat pengembangan wisata berkelanjutan di Ambon serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat lokal.

Dalam konteks teori *collaborative governance* yang dikembangkan oleh Alim et al. (2022), kolaborasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan memerlukan beberapa faktor utama, yaitu keterlibatan aktif semua aktor, transparansi dalam proses pengambilan keputusan, serta adanya kepemimpinan yang mampu menjembatani kepentingan berbagai pihak. Berdasarkan teori ini, Kota Ambon masih berada dalam tahap awal kolaborasi, di mana komunikasi antar aktor sudah mulai terjadi tetapi belum cukup kuat untuk menghasilkan kebijakan dan tindakan yang terkoordinasi dengan baik.

Agar sinergi dalam pengembangan pariwisata hijau di Kota Ambon dapat berjalan lebih efektif, perlu ada mekanisme formal yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi secara rutin. Misalnya, pembentukan forum koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat adat, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas sadar wisata dalam merancang strategi bersama. Dengan adanya forum semacam ini, setiap aktor dapat berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan dapat diimplementasikan secara lebih sistematis.

Peran Kearifan Lokal dalam Mendukung Pariwisata Hijau

Pariwisata hijau di Kota Ambon tidak dapat dilepaskan dari kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat. Salah satu bentuk kearifan lokal yang paling dikenal di Maluku adalah praktik sasi, sebuah sistem larangan adat yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam. Sistem ini menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat lokal telah lama menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, jauh sebelum konsep pariwisata hijau menjadi wacana global.

Praktik sasi umumnya diterapkan dalam pengelolaan laut dan hasil bumi, di mana masyarakat adat melarang eksploitasi sumber daya tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk memungkinkan regenerasi alam. Dalam wawancara dengan salah satu tokoh adat di Negeri Hukurila, seorang kepala *kewang* menjelaskan bahwa sistem *sasi* laut telah lama diterapkan sebagai bentuk kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Ia menuturkan bahwa praktik ini bertujuan untuk melindungi terumbu karang dan menjaga keberlanjutan populasi ikan. Melalui mekanisme *sasi*, wilayah laut tertentu ditutup sementara untuk pemanfaatan, dan hanya dibuka kembali dalam periode tertentu dengan batasan yang ketat. Menurutnya, pendekatan ini telah terbukti efektif dalam menjaga kesehatan laut dan memastikan sumber daya alam tetap lestari bagi generasi mendatang. Namun, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah dan pelaku wisata agar wisatawan memahami dan menghormati aturan adat tersebut.

Dari observasi lapangan di Hukurila, ditemukan bahwa kawasan pesisir yang masih menerapkan sasi memiliki keanekaragaman hayati yang lebih tinggi dibandingkan dengan area lain yang tidak memiliki perlindungan serupa. Terumbu karang di wilayah ini tampak lebih sehat, dan populasi ikan lebih beragam, yang menunjukkan efektivitas sistem ini dalam menjaga ekosistem laut. Selain *sasi*, nilai-nilai adat lainnya juga berperan dalam mendukung konsep pariwisata hijau. Konsep pela gandong, yang menekankan solidaritas antar komunitas, berkontribusi dalam pengelolaan wisata berbasis komunitas di beberapa desa wisata di Ambon. Di Desa Amahusu, misalnya, masyarakat secara kolektif mengelola kawasan wisata dengan berbasis pada gotong royong. Salah satu pengelola homestay di Amahusu menjelaskan bahwa konsep pariwisata yang diterapkan di desanya berlandaskan semangat kebersamaan dan keberlanjutan. Menurutnya, setiap kedatangan wisatawan tidak hanya menjadi peluang ekonomi bagi individu tertentu, tetapi melibatkan seluruh komunitas. Warga desa berpartisipasi dalam berbagai aspek, mulai dari menyediakan makanan berbasis bahan lokal, menawarkan jasa pemandu wisata, hingga menjaga kebersihan lingkungan secara kolektif. Baginya, pariwisata bukan sekadar mencari keuntungan, tetapi juga upaya menjaga keseimbangan desa agar tetap nyaman dan lestari bagi generasi mendatang. Hal ini mencerminkan bagaimana pariwisata hijau dapat berjalan efektif ketika ada keterlibatan aktif dari masyarakat setempat. Temuan ini memperlihatkan bagaimana nilai kolektif dalam budaya lokal dapat menjadi modal sosial yang berharga dalam mengembangkan pariwisata hijau yang berkelanjutan.

Konsep-konsep kearifan lokal ini sejalan dengan teori *indigenous knowledge system* yang dikembangkan oleh Jessen et al. (2022), yang menekankan bahwa pengetahuan tradisional bukan sekadar warisan budaya, tetapi juga merupakan sistem adaptif yang mampu mendukung keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks pariwisata hijau, pengetahuan lokal ini dapat berperan sebagai dasar dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat. Namun, meskipun praktik sasi dan nilai-nilai adat lain telah terbukti efektif dalam mendukung prinsip keberlanjutan, tantangan tetap ada. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya integrasi kearifan lokal ke dalam kebijakan pariwisata resmi.

Seorang akademisi dari Universitas Pattimura menyoroti bahwa regulasi pariwisata hijau di Ambon masih cenderung mengacu pada standar global, tanpa sepenuhnya mengakomodasi praktik-praktik lokal seperti sasi. Menurutnya, pendekatan ini kurang optimal karena tidak mempertimbangkan kearifan lokal yang telah terbukti efektif dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Ia menekankan bahwa penggabungan antara standar keberlanjutan global dengan praktik tradisional seperti sasi dapat menciptakan model pengelolaan wisata yang lebih holistik, unik, dan efektif. Dengan demikian, Ambon dapat mengembangkan pariwisata hijau yang tidak hanya berbasis pada prinsip ekologi modern, tetapi juga menghormati nilai-nilai budaya setempat. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebijakan formal dan sistem pengetahuan lokal yang telah lama diterapkan oleh masyarakat adat.

Agar kearifan lokal dapat benar-benar berkontribusi dalam pariwisata hijau, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dalam pembuatan kebijakan. Pemerintah daerah perlu mengakui dan mengintegrasikan praktik adat seperti sasi dalam regulasi pariwisata hijau, misalnya dengan mengadopsi sistem zonasi berbasis adat atau mengembangkan skema insentif bagi komunitas yang menerapkan praktik keberlanjutan. Selain itu, pelibatan masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan juga harus diperkuat agar keberlanjutan pariwisata di Ambon dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diwariskan oleh leluhur mereka.

Tantangan Implementasi Pariwisata Hijau di Kota Ambon

Upaya mewujudkan pariwisata hijau di Kota Ambon menghadapi berbagai hambatan yang kompleks, mulai dari lemahnya koordinasi kebijakan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM), hingga infrastruktur pendukung yang belum memadai. Meskipun konsep ini telah menjadi perhatian global, implementasinya di tingkat lokal masih menghadapi banyak kendala struktural dan teknis.

Salah satu tantangan utama adalah lemahnya koordinasi kebijakan antar sektor. Meskipun pemerintah daerah telah menaruh perhatian pada isu keberlanjutan, belum ada regulasi khusus yang mengatur pariwisata hijau secara komprehensif. Regulasi yang ada masih tersebar dalam berbagai kebijakan lingkungan, tata ruang, dan pariwisata, yang sering kali tidak sinkron satu sama lain. Seorang pejabat dari Dinas Pariwisata Kota Ambon mengungkapkan bahwa upaya mendorong pariwisata hijau masih menghadapi tantangan dalam hal regulasi yang bersifat parsial. Saat ini, beberapa aturan terkait keberlanjutan sudah ada di sektor lingkungan hidup, namun sektor pariwisata sendiri masih lebih berfokus pada promosi dan peningkatan jumlah wisatawan. Akibatnya, tidak ada kebijakan yang secara komprehensif mengatur pengelolaan pariwisata hijau di Ambon. Ia juga menyoroti bahwa koordinasi antar instansi masih menjadi kendala utama, sehingga berbagai inisiatif keberlanjutan cenderung berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi yang jelas.

Dari observasi lapangan, terlihat bahwa meskipun beberapa destinasi wisata di Ambon telah menerapkan praktik ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan sampah berbasis komunitas, banyak destinasi lainnya yang masih beroperasi dengan cara konvensional. Kurangnya mekanisme pemantauan dan evaluasi dari pemerintah juga menyebabkan inisiatif keberlanjutan tidak berjalan secara konsisten.

Selain lemahnya koordinasi kebijakan, tantangan lain adalah keterbatasan kapasitas SDM di sektor pariwisata hijau. Banyak pelaku usaha pariwisata, mulai dari pengelola hotel, operator tur, hingga masyarakat lokal yang terlibat dalam industri ini, belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai prinsip-prinsip pariwisata hijau. Seorang pengelola homestay di Desa Amahusu menyampaikan bahwa kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan sudah ada di kalangan pelaku usaha wisata lokal. Namun, tantangan utama yang mereka hadapi adalah kurangnya pengetahuan tentang bagaimana mengelola wisata yang benar-benar ramah lingkungan. Ia menekankan bahwa tanpa pelatihan dan dukungan yang lebih konkret dari pemerintah, sulit bagi pelaku usaha kecil untuk menerapkan prinsip-prinsip

keberlanjutan secara efektif. Menurutnya, bimbingan teknis serta akses terhadap sumber daya yang mendukung pariwisata hijau akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas layanan sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan di desa wisata tersebut.

Keterbatasan kapasitas ini tidak hanya terjadi di tingkat masyarakat, tetapi juga di kalangan birokrasi. Seorang akademisi dari Universitas Pattimura menekankan bahwa di banyak daerah, kebijakan pariwisata hijau sering kali dirancang tanpa pemahaman teknis yang memadai. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi pariwisata berkelanjutan tidak cukup hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga harus didukung oleh riset yang komprehensif serta pendampingan bagi para pelaku industri. Tanpa pendekatan berbasis data dan bimbingan yang berkelanjutan, kebijakan yang dibuat berisiko tidak efektif dan sulit diterapkan di lapangan. Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya sinergi antara akademisi, pemerintah, dan pelaku usaha dalam menyusun serta menjalankan strategi pariwisata hijau yang realistis dan aplikatif.

Tantangan berikutnya adalah infrastruktur pendukung yang masih terbatas. Salah satu faktor utama yang menghambat implementasi pariwisata hijau adalah kurangnya fasilitas yang mendukung praktik ramah lingkungan. Infrastruktur dasar seperti sistem pengelolaan sampah, energi terbarukan, serta transportasi berkelanjutan masih jauh dari memadai. Dari hasil observasi di beberapa destinasi wisata di Ambon, terlihat bahwa masih banyak kawasan wisata yang belum memiliki tempat pembuangan sampah yang layak, sementara akses transportasi yang ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik atau jalur sepeda, hampir tidak tersedia.

Dalam konteks lebih luas, tantangan-tantangan ini sejalan dengan konsep *barriers to sustainable tourism* yang dikemukakan oleh Tölkes (2020). Mereka mengidentifikasi beberapa hambatan utama dalam implementasi pariwisata berkelanjutan di negara berkembang, termasuk kelemahan regulasi, kurangnya koordinasi antar sektor, minimnya pengetahuan dan kapasitas SDM, serta infrastruktur yang tidak mendukung. Dalam kasus Kota Ambon, seluruh faktor ini terlihat jelas dan menjadi kendala utama dalam mewujudkan pariwisata hijau.

Meskipun tantangan ini cukup besar, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Pertama, diperlukan kebijakan yang lebih terintegrasi dengan pendekatan multisektoral, di mana pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku industri bekerja sama dalam merancang regulasi yang sesuai dengan kondisi lokal. Kedua, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan edukasi tentang pariwisata hijau menjadi langkah krusial agar para pemangku kepentingan dapat mengadopsi praktik yang lebih ramah lingkungan. Ketiga, investasi dalam infrastruktur berkelanjutan harus menjadi prioritas, termasuk pembangunan sistem pengelolaan sampah yang efisien, penyediaan energi terbarukan untuk fasilitas wisata, serta pengembangan transportasi yang lebih ramah lingkungan.

Strategi Penguatan Pariwisata Hijau melalui Pendekatan Multisektoral

Upaya pengembangan pariwisata hijau di Kota Ambon tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak, melainkan harus melibatkan berbagai sektor dalam suatu ekosistem yang saling mendukung. Pendekatan multisektoral menjadi kunci dalam memastikan bahwa aspek keberlanjutan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar terintegrasi dalam kebijakan, praktik bisnis, serta kesadaran masyarakat. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat tiga strategi utama yang dapat memperkuat implementasi pariwisata hijau di Kota Ambon: penguatan regulasi spesifik, peningkatan kapasitas masyarakat, dan model kolaborasi lintas sektor.

Pertama, penguatan regulasi spesifik dalam menata kerangka hukum pariwisata hijau. Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi pariwisata hijau di Kota Ambon adalah ketiadaan regulasi yang secara spesifik mengatur pengembangan dan praktik keberlanjutan di sektor pariwisata. Saat ini, kebijakan yang ada masih bersifat umum dan tersebar dalam berbagai regulasi terkait lingkungan, tata ruang, serta ekonomi kreatif, tanpa satu kerangka hukum yang mengikat semua aspek pariwisata hijau secara komprehensif.

Seorang pejabat dari Dinas Pariwisata Kota Ambon menyoroti pentingnya regulasi yang lebih terarah dalam pengembangan pariwisata hijau. Ia mengungkapkan bahwa meskipun konsep keberlanjutan sering dibahas, hingga kini belum ada aturan khusus yang dapat menjadi pedoman teknis bagi pelaku industri pariwisata. Akibatnya, berbagai inisiatif yang muncul cenderung berjalan secara mandiri tanpa standar yang jelas, sehingga sulit untuk memastikan bahwa praktik yang diterapkan benar-benar berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan sosial. Menurutnya, diperlukan kebijakan yang lebih spesifik dan terintegrasi agar upaya pariwisata hijau di Ambon dapat berjalan dengan lebih efektif dan terarah.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah daerah perlu menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Pariwisata Hijau yang mencakup standar keberlanjutan bagi usaha pariwisata, mekanisme insentif bagi bisnis yang menerapkan praktik ramah lingkungan, serta sistem pemantauan dan evaluasi yang berbasis data. Pengalaman dari daerah lain menunjukkan bahwa regulasi yang jelas mampu meningkatkan komitmen pelaku usaha dalam menjalankan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Dari hasil observasi di beberapa destinasi wisata di Ambon, terlihat bahwa kesadaran akan praktik ramah lingkungan sudah mulai tumbuh, tetapi tanpa aturan yang mengikat, upaya ini sulit untuk diadopsi secara luas. Misalnya, beberapa pengelola homestay telah menerapkan pengelolaan limbah mandiri dan penggunaan energi terbarukan, tetapi tanpa regulasi, praktik ini hanya bersifat sukarela dan tidak menjadi standar industri. Selain regulasi, keberhasilan pariwisata hijau juga sangat bergantung pada kesiapan dan kapasitas masyarakat lokal dalam menjalankan praktik keberlanjutan. Masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar destinasi wisata, memiliki peran sentral dalam menjaga ekosistem dan memastikan bahwa pariwisata tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dan budaya lokal. Namun, wawancara dengan seorang pemilik usaha kuliner di Pantai Natsepa mengungkapkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami

konsep pariwisata hijau. Ia menyatakan bahwa meskipun ada keinginan untuk berkontribusi dalam pengembangan wisata berkelanjutan, banyak pelaku usaha yang tidak tahu harus memulai dari mana. Kurangnya informasi dan bimbingan membuat mereka kesulitan menerapkan praktik ramah lingkungan dalam operasional sehari-hari. Menurutnya, jika ada pelatihan atau pendampingan yang diberikan secara berkelanjutan, para pelaku usaha akan lebih siap dan mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam bisnis mereka, sehingga mendukung pengembangan pariwisata hijau yang lebih efektif di Ambon.

Untuk menjawab tantangan ini, program pelatihan dan edukasi perlu diperluas, baik melalui inisiatif pemerintah, akademisi, maupun sektor swasta. Program ini bisa mencakup pelatihan tentang pengelolaan sampah berbasis komunitas, konservasi ekosistem pesisir, hingga pengembangan produk wisata yang berbasis kearifan lokal. Dari hasil observasi di Negeri Hukurila, yang memiliki potensi wisata bahari dengan terumbu karang yang indah, terlihat bahwa beberapa kelompok masyarakat telah melakukan upaya konservasi dengan melibatkan wisatawan dalam kegiatan seperti transplantasi karang. Praktik ini menunjukkan bahwa dengan pelatihan yang tepat, masyarakat bisa menjadi motor penggerak utama dalam menjaga keberlanjutan pariwisata.

Strategi terakhir yang sangat krusial dalam memperkuat pariwisata hijau adalah membangun model kolaborasi lintas sektor yang efektif. Pariwisata hijau bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan sektor swasta, akademisi, komunitas lokal, dan organisasi masyarakat sipil. Dalam konsep *public-private partnership in sustainable tourism*, kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta memainkan peran penting dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang lebih ramah lingkungan. Model ini memungkinkan sektor swasta untuk berinvestasi dalam infrastruktur berkelanjutan, sementara pemerintah menyediakan regulasi dan insentif yang mendukung praktik hijau.

Dalam wawancara dengan seorang akademisi dari Universitas Pattimura, ia menegaskan bahwa keberhasilan pariwisata hijau di Ambon sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan. Dunia usaha perlu dilibatkan secara aktif, terutama dalam pengembangan fasilitas wisata yang berbasis energi terbarukan serta penerapan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif. Tanpa adanya keterlibatan sektor swasta dan dukungan regulasi yang jelas, berbagai inisiatif keberlanjutan hanya akan bersifat sporadis dan sulit diimplementasikan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kebijakan yang mampu menjembatani kepentingan berbagai pihak agar pengelolaan pariwisata hijau dapat berjalan secara sinergis dan berkelanjutan.

Salah satu contoh nyata dari model kolaborasi ini adalah inisiatif yang dijalankan di Pantai Liang, di mana pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku usaha lokal dalam menyediakan fasilitas wisata berbasis keberlanjutan, seperti toilet ramah lingkungan dan penggunaan bahan bangunan yang berasal dari sumber daya lokal. Namun, masih banyak

potensi kolaborasi yang belum dimaksimalkan. Misalnya, akademisi dapat berkontribusi lebih dalam dengan menyediakan riset dan kajian mengenai dampak pariwisata terhadap lingkungan, sementara komunitas sadar wisata dapat berperan dalam mengedukasi wisatawan tentang praktik berwisata yang lebih bertanggung jawab.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan pariwisata hijau di Kota Ambon membutuhkan kerangka regulasi yang lebih terarah dan strategi sinergis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara aktif dan setara. Tujuan penelitian untuk menganalisis strategi pengembangan melalui pendekatan regulatif dan sinergi multisektoral terjawab dengan jelas melalui temuan bahwa ketiadaan regulasi spesifik telah menghambat integrasi prinsip keberlanjutan dalam tata kelola pariwisata, sementara potensi kolaborasi antar sektor belum dioptimalkan akibat lemahnya koordinasi dan perbedaan orientasi kebijakan. Dalam konteks ini, pemerintah dituntut untuk tidak hanya menjadi pengatur, tetapi juga penghubung antarsektor, yang mampu merumuskan kebijakan inklusif berbasis bukti dan kebutuhan lokal. Kebaruan dari studi ini terletak pada penekanan terhadap urgensi pendekatan kebijakan yang adaptif dan partisipatif, yang memperkuat sinergi antara sektor publik, swasta, komunitas lokal, dan akademisi dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan. Jika strategi ini dijalankan secara konsisten, Ambon bukan hanya mampu meningkatkan daya saing destinasi wisatanya, tetapi juga menjadi model pembangunan pariwisata hijau yang berpijak pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan timur Indonesia.

PERNYATAAN ETIKA PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang berlaku, termasuk pemberian persetujuan yang diinformasikan (*informed consent*), perlindungan terhadap kerahasiaan informan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Perhatian khusus diberikan kepada partisipan dari kelompok rentan guna memastikan keselamatan, kenyamanan, dan hak partisipasi yang setara. Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal, dan penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan. Seluruh data dan informasi yang disajikan diperoleh melalui metode penelitian yang sah dan telah diverifikasi untuk memastikan akurasi dan keandalannya. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dibatasi hanya pada bantuan teknis penulisan dan penyuntingan bahasa, tanpa memengaruhi substansi ilmiah dari karya ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada para informan atas wawasan berharga yang diberikan, serta kepada para penelaah anonim atas masukan konstruktif terhadap versi awal naskah ini. Penulis bertanggung jawab penuh atas isi dan kesimpulan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdalla, M. M., Oliveira, L. G. L., Azevedo, C. E. F., & Gonzalez, R. K. (2018). Quality in qualitative organizational research: Types of triangulation as a methodological

alternative. *Administração: Ensino e Pesquisa*, *19*(1).

Afionis, S., Mkwambisi, D. D., & Dallimer, M. (2020). Lack of Cross-Sector and Cross-Level Policy Coherence and Consistency Limits Urban Green Infrastructure Implementation in Malawi. *Frontiers in Environmental Science*, *8*. https://doi.org/10.3389/fenvs.2020.558619

Alim, I., Taufik, A., & Nurdin, N. (2022). Collaborative Governance through Public Service Malls in Barru Regency: Assessment, Initiation, Deliberation, and Implementation. *Journal of Government and Political Issues*, *2*(3), 167–174.

Amin, D. Y. (2019). Kajian Pengembangan Obyek Wisata Bahari Pantai Hunimua Kabupaten Maluku Tengah. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, *1*(01).

Armenski, T., Dwyer, L., & Pavluković, V. (2018). Destination Competitiveness: Public and Private Sector Tourism Management in Serbia. *Journal of Travel Research*, *57*(3), 384–398. https://doi.org/10.1177/0047287517692445

Bandjar, Q. H., Wipranata, B. I., & Wirawati, S. (2021). Studi Keberhasilan Pengelolaan Objek Wisata Berbasis Community Based Tourism (CBT), Objek Studi: Pantai Ngurbloat, Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (STUPA)*, *3*, 3467–3478.

Bans-Akutey, A., & Tiimub, B. M. (2021). Triangulation in research. *Academia Letters*, *2*.

Bastian, D., Retraubun, N., & Joseph, C. (2018). Analisis Kemunduran Garis Pantai Wisata Kuako Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah. *Manumata: Jurnal Ilmu Teknik*, *4*(1), 22–31.

Bui, H. T., Jones, T. E., Weaver, D. B., & Le, A. (2020). The adaptive resilience of living cultural heritage in a tourism destination. *Journal of Sustainable Tourism*, *28*(7), 1022–1040.

Casado-Aranda, L.-A., Sánchez-Fernández, J., & Bastidas-Manzano, A.-B. (2021). Tourism research after the COVID-19 outbreak: Insights for more sustainable, local and smart cities. *Sustainable Cities and Society*, *73*, 103126. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.103126

Cheung, K. S., & Li, L.-H. (2019). Understanding visitor–resident relations in overtourism: developing resilience for sustainable tourism. *Journal of Sustainable Tourism*, *27*(8), 1197–1216. https://doi.org/10.1080/09669582.2019.1606815

Coronella, T., & Aiken-Wisniewski, S. A. (2022). Using Qualitative Methods. In *Scholarly Inquiry in Academic Advising* (pp. 128–145). Routledge.

Dewasiri, N., Banda, Y. K. W., & Azeez, A. A. (2018). Triangulation approaches in finance research. *Colombo Journal of Multi-Disciplinary Research*, *3*(2).

Dwyer, L. (2018). Saluting while the ship sinks: the necessity for tourism paradigm change. *Journal of Sustainable Tourism*, *26*(1), 29–48. https://doi.org/10.1080/09669582.2017.1308372

Ibnou-Laaroussi, S., Rjoub, H., & Wong, W.-K. (2020). Sustainability of Green Tourism among International Tourists and Its Influence on the Achievement of Green Environment: Evidence from North Cyprus. *Sustainability*, *12*(14), 5698. https://doi.org/10.3390/su12145698

Jalmaf, A. J., Sahusilawane, S., & Rehatta, G. (2022). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Dalam Meningkatkan Jumlah Pengunjung Di Pantai Ngurbloat Maluku Tenggara. *Jurnal Administrasi Terapan*, *1*, 87–91.

Jessen, T. D., Ban, N. C., Claxton, N. X., & Darimont, C. T. (2022). Contributions of Indigenous

Knowledge to ecological and evolutionary understanding. *Frontiers in Ecology and the Environment*, *20*(2), 93–101. https://doi.org/10.1002/fee.2435

Jiang, Y., Ritchie, B. W., & Verreynne, M. (2019). Building tourism organizational resilience to crises and disasters: A dynamic capabilities view. *International Journal of Tourism Research*, *21*(6), 882–900. https://doi.org/10.1002/jtr.2312

Joseph, C., Telussa, M. F., & Latupeirissa, J. E. (2020). Perencanaan master plan kawasan objek wisata pantai kuako kecamatan amahai kabupaten maluku tengah. *Manumata: Jurnal Ilmu Teknik*, *6*(2), 53–61.

Kawuryan, M. W., Fathani, A. T., Purnomo, E. P., Salsabila, L., Azmi, N. A., Setiawan, D., & Fadhlurrohman, M. I. (2022). Sustainable tourism development in Indonesia: Bibliometric review and analysis. *Indonesian Journal of Geography*, *54*(1), 154–166.

Kennedy, P. S. J., Tobing, S. J. L., Heatubun, A. B., & Lumbantoruan, R. (2018). Potensi Pariwisata Maluku Barat Daya Sebuah Kajian Pustaka. *National Conference of Creative Industry*.

Kim, S., & Bramwell, B. (2019). Boundaries and boundary crossing in tourism: A study of policy work for tourism and urban regeneration. *Tourism Management*, *75*, 78–89. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tourman.2019.04.019

Klerck, P. D. De, & Baets, B. P. De. (2020). Assessing the "value" of nature-based solutions at the Belgian coast for sustainable tourism, using a ecosystem-based management approach. *2020 International Conference and Utility Exhibition on Energy, Environment and Climate Change (ICUE)*, 1–7. https://doi.org/10.1109/ICUE49301.2020.9306955

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2019). *Interviews: Learning the craft of qualitative research interviewing*. sage.

Meturan, F. T., Taking, M. I., & Latief, R. (2021). Analisis Ketersediaan Prasaran Dan Fasilitas Penunjang Pengembangan Objek Wisata Pantai Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten maluku Tengah. *Journal of Urban Planning Studies*, *2*(1), 85–95.

Monday, T. U. (2020). Impacts of interview as research instrument of data collection in social sciences. *Journal of Digital Art & Humanities*, *1*(1), 15–24.

Moyle, B. D., Moyle, C. J., & Bec, A. (2018). The coexistence of tourism and mining: a strategic framework for cross-sectoral interaction. *Current Issues in Tourism*, *21*(17), 1966–1987. https://doi.org/10.1080/13683500.2016.1238884

Moyle, C., Carmignani, F., Moyle, B., & Anwar, S. (2021). Beyond Dutch Disease: Are there mediators of the mining–tourism nexus? *Tourism Economics*, *27*(4), 744–761. https://doi.org/10.1177/1354816619899223

Ngassam, S. B., Asongu, S. A., & Ngueuleweu, G. T. (2022). A revisit of the natural resource curse in the tourism industry. *Resources Policy*, *88*, 104384. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104384

Orîndaru, A., Popescu, M.-F., Alexoaei, A. P., Căescu, Ștefan-C., Florescu, M. S., & Orzan, A.-O. (2021). Tourism in a Post-COVID-19 Era: Sustainable Strategies for Industry's Recovery. *Sustainability*, *13*(12), 6781. https://doi.org/10.3390/su13126781

Pan, S.-Y., Gao, M., Kim, H., Shah, K. J., Pei, S.-L., & Chiang, P.-C. (2018). Advances and challenges in sustainable tourism toward a green economy. *Science of The Total Environment*, *635*, 452–469. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.04.134

Purbadi, Y. D., & Lake, R. C. (2022). Konsep Kampung-Wisata Sejahtera, Kreatif, Cerdas dan

Lestari Berkelanjutan Kasus Studi di Karangwaru Riverside, Yogyakarta. *EMARA: Indonesian Journal of Architecture*, *5*(1), 12–23.

Rahman, S. S., & Baddam, P. R. (2021). Community Engagement in Southeast Asia's Tourism Industry: Empowering Local Economies. *Global Disclosure of Economics and Business*, *10*(2), 75–90. https://doi.org/10.18034/gdeb.v10i2.715

Rahmawati, R., Suprapti, A. R., Pinta, S. R. H., & Sudira, P. (2021). Green entrepreneurship: a study for developing eco-tourism in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, *8*(5), 143–150.

Renjaan, M., & Renjaan, E. A. (2022). Tingkat Kesesuaian Pantai Ngursarnadan Kabupaten maluku Tenggara terhadap aktivitas rekreasi pantai. *Jurnal Lemuru*, *4*(3), 215–230.

Romeon, R. H., & Sukmawati, A. M. (2021). Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Negeri Saleman Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Tata Kota Dan Daerah*, *13*(1), 1–8.

Santos, K. da S., Ribeiro, M. C., Queiroga, D. E. U. de, Silva, I. A. P. da, & Ferreira, S. M. S. (2020). The use of multiple triangulations as a validation strategy in a qualitative study. *Ciencia & Saude Coletiva*, *25*, 655–664.

Šaparnienė, D., Mejerė, O., Raišutienė, J., Juknevičienė, V., & Rupulevičienė, R. (2022). Expression of Behavior and Attitudes toward Sustainable Tourism in the Youth Population: A Search for Statistical Types. *Sustainability*, *14*(1), 473. https://doi.org/10.3390/su14010473

Sobaih, A. E. E., Elshaer, I., Hasanein, A. M., & Abdelaziz, A. S. (2021). Responses to COVID-19: The role of performance in the relationship between small hospitality enterprises' resilience and sustainable tourism development. *International Journal of Hospitality Management*, *94*, 102824. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102824

Susiyanto, S. (2022). Concept application analysis green tourism in the development of Borobudur Temple as a super priority destination. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, *8*(4), 1371–1378.

Tölkes, C. (2020). The role of sustainability communication in the attitude–behaviour gap of sustainable tourism. *Tourism and Hospitality Research*, *20*(1), 117–128. https://doi.org/10.1177/1467358418820085

Wijaya, N. S., Arcana, K. T. P., & Sudarmawan, I. W. E. (2019). The role of tourism destination and human resources in sustainable tourism implementation in Indonesia. *Journal of Business on Hospitality and Tourism*, *5*(2), 228–237.

Wondirad, A., Tolkach, D., & King, B. (2020). Stakeholder collaboration as a major factor for sustainable ecotourism development in developing countries. *Tourism Management*, *78*, 104024.